

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan merupakan rangkaian urusan pemerintah, perangkat administrasi serta dalam arti negara tidak hanya terkait dengan pegawai pemerintah melainkan juga sistem pengelolaan yang melibatkan pengaturan sumber daya publik. Kebijakan juga mendorong pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, ekonomi, dan manusia untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan tujuan, rencana, program, tindakan, keputusan dan solusi (Kusnandar, 2001). Kebijakan muncul dengan adanya kebutuhan dan persoalan di dalam masyarakat. Aktor dalam pembuatan kebijakan yaitu pemerintah yang memiliki tujuan untuk memenuhi harapan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan publik. Kebijakan publik dijelaskan sebagai keterkaitan dalam mencapai sasaran dan hasil akhir dari aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah (Desrinelti *et al.*, 2021).

Pada masa pemerintahan bupati Sugiri Sancoko, bupati mengambil kebijakan baru yaitu pembangunan Monumen Reyog Ponorogo (MRP) tepatnya di pertambangan batu gamping Desa Sampung, Kabupaten Ponorogo. Dilihat dari aspek geografisnya bupati memilih Desa Sampung karena lokasinya berada di dataran tinggi. Pembangunan ini bertujuan untuk menonjolkan ikon reyog dan sebagai *landmark* Kabupaten Ponorogo yang merupakan seni tradisional kebanggaan masyarakat Ponorogo. Dalam hal ini, untuk mencapai sasaran pembangunan termasuk pengembangan sektor pariwisata diperlukan perencanaan yang teliti, pelaksanaan yang sesuai, dan pengawasan yang efektif. Perencanaan pembangunan pariwisata merupakan suatu proses yang terstruktur dan masuk akal dalam menyiapkan rencana untuk segala kegiatan atau aktivitas pariwisata dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Hal ini digunakan untuk mencapai target dengan efisien dan efektif dengan alokasi yang optimal dari seluruh sumber daya yang ada (Kurniawan, 2017).

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, program pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 15 Desember 2022 dan diperkirakan akan selesai pada 4 Desember 2024 (Prokopim, 2023). Dengan kebijakan tersebut, Bupati berharap dapat memperkuat citra Ponorogo sebagai destinasi wisata budaya. Dengan

mempromosikan reyog sebagai ikoniknya masyarakat Ponorogo juga dapat menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara yang ingin berkunjung dan menikmati pesona wisata daerah. Hal ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat Ponorogo tetapi juga membantu melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya daerah. Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur resmi memulai pembangunan dengan meletakkan batu pertama di lokasi pendirian monumen reyog yang diperkirakan mempunyai ketinggian 126 meter dengan itu melampaui patung Garuda Wisnu Kencana yang hanya memiliki tinggi 121 meter. Perencanaan pembangunan ini bupati terinspirasi dari patung Garuda Wisnu Kencana di Kabupaten Badung, Bali. Melihat keberhasilan tempat wisata tersebut bupati mengambil kebijakan baru untuk program pembangunan ini yang merepresentasikan kegagahan dan keistimewaan Reyog Ponorogo (Pebrianti, 2022).

Pembangunan monumen reyog Ponorogo merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi yang dimasukkan kategori Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019 mengenai percepatan pembangunan Kawasan Gerbang Kertasusila (Bangkalan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, dan daerah sekitarnya seperti Bojonegoro, Jombang, dan Tuban), serta Kawasan Bromo, Tengger, Semeru (BTS) dan Jalur Lingkar Selatan. Pemprov Jatim mendukung keberadaan Monumen Reyog Ponorogo ini dengan menyiapkan dukungan dana sebesar Rp 11 Miliar. Mengingat kebutuhan seluruh pembangunan monumen mencapai kurang lebih Rp 235 miliar sementara saat ini masih tersedia Rp 85 miliar (jatim.times.co.id, 2023). Meskipun demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turut berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk memperbaiki akses jalan ke wilayah tersebut. Selebihnya, kurangnya anggaran tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo harus mencari investor lain (Jatimprov, 2023).

Selain pembangunan monumen reyog juga akan dibangun museum peradaban, hotel, dan fasilitas penunjang lainnya sehingga diharapkan dapat berkembang menjadi tujuan wisata potensial dan menumbuhkan daya sektor perekonomian. Bupati Sugiri Sancoko berharap pembangunan tahap pertama monumen reyog dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan kontruksi ini tidak hanya menjadi ikon wisata baru tetapi juga menjadi pelopor roda perekonomian seluruh warga Ponorogo (Nurdiyanto, 2023).

Pelaksanaan pembangunan monumen ini sebelumnya dilakukan proses lelang, setelah proses lelang berakhir sejak tanggal 25 Oktober 2022 telah ditetapkan pemenang lelang yaitu PT. Widya Satria yang beralamat di Ketintang Permai Blok BB No. 20,

Surabaya sebagai pelaksananya dan dibantu konsultan dari PT. Rancang Persada dan PT. Delta Buana Konsultan. Program senilai Rp 85 miliar itu akan dibiayai APBD 2022-2024. Berdasarkan hasil evaluasi, Budi Darmawan selaku Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa PT. Widya Satria adalah satu-satunya perusahaan konstruksi yang memenuhi kriteria, manajemen, teknis, dan persyaratan lainnya (Pebrianti, 2022).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh bupati Sugiri Sancoko mengarahkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) untuk pengembangan destinasi wisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata. Hal itu terungkap saat bupati memberikan tanggapan terhadap pendapat umum dalam rapat paripurna DPRD Ponorogo pada Rabu 15 Desember 2021 di Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo. Berbagai agenda dibahas dalam rapat tersebut antara lain terhadap usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Ripparkab Ponorogo 2022-2025 dan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung mengandung aspek yang menarik, terutama terkait strategi pembangunan sektor pariwisata daerah (Newsroom, 2021). Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sari Gunung hanya fokus pada sektor pertambangan dan pemasok jasa peledak pertambangan. Dengan melakukan peningkatan kinerja Perumda Sari Gunung diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat. Selain itu, manfaat yang diperoleh dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Prokopim, 2021).

Perencanaan pembangunan monumen reyog harus didasarkan pada empat pilar strategi, termasuk strategi pengembangan kelembagaan pariwisata, strategi pengembangan pemasaran pariwisata, strategi pengembangan industri pariwisata, dan strategi pengembangan tujuan pariwisata. Secara teknis, strategi ini termasuk mengidentifikasi proposisi penjualan yang unik, meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan citra, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan kota dan penyedia pariwisata, mengembangkan paket perjalanan yang berkualitas tinggi dan terintegrasi, dan memperkuat koordinasi pariwisata/*multi-stakeholder* berdasarkan *QuadrupleHelix* (Newsroom, 2021).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sangat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan industri pariwisata. Hal itu terbukti setelah ditetapkannya Peraturan Daerah 2023-2025 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (Ripparkab) Kabupaten

Ponorogo. Pada hari Senin 12 Juni 2023 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Ponorogo, Bupati Sugiri Sancoko bersama empat pimpinan DPRD Ponorogo telah menandatangani berita acara tentang Peraturan Daerah (Perda) ripparkab yang berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak terkait dengan industri pariwisata. Dengan berlakunya perda ini, maka fokus utama potensi pariwisata akan lebih dikembangkan dan akan didukung keterkaitan regulasi untuk mempertajam arah pembangunan terutama dalam sektor pariwisata yang merupakan bagian dari *Grand Design* pengembangan pariwisata Kabupaten Ponorogo. Menurut bupati, dengan mengenali potensi wisata di daerah tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo akan mampu menetapkan jalur pengembangan untuk daerah tujuan wisata yang memiliki potensi termasuk menentukan lokasi wisata yang strategis. Salah satu langkah konkret dalam upaya ini adalah perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo (Jihan, 2023).

Lokasi pembangunan monumen ini sebelumnya digunakan untuk mencari mata pencaharian masyarakat Desa Sampung yaitu pertambangan batu gamping yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, setelah berakhirnya kegiatan pertambangan akibat pembangunan monumen reyog kondisi ekonomi di desa ini mengalami penurunan bahkan berimbas negatif pada sejumlah penduduk. Situasi ini terjadi karena sebagian besar warga Desa Sampung kehilangan pekerjaan utama mereka sebagai buruh tambang batu gamping (Islami, 2021).

Pasca pembangunan monumen yang menjadi salah satu daya tarik wisata Kabupaten Ponorogo, banyak warga desa yang beralih pekerjaan yang awalnya penambang batu gamping (*hard skills*) menjadi pengelola wisata ataupun ketrampilan yang lain (*soft skills*). Selama bertahun-tahun mereka telah mengandalkan ketrampilan keras berkaitan dengan penggunaan alat berat ataupun semacamnya. Perubahan tersebut memang tidaklah mudah, masyarakat harus bersedia menerima dengan mengembangkan kemampuan baru. Peran pemerintah dan non-pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat desa. Dengan demikian, keberadaan monumen ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat sekitar (Geologis *et al.*, 2021).

Masyarakat harus dilibatkan dalam semua perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi program, karena masyarakat yang mengetahui persoalan dan kebutuhan pembangunan di daerahnya. Dilihat dari segi penataan pembangunan, masyarakat menempati dua posisi utama, yaitu sebagai pelaku dan sebagai penerima manfaat dari hasil kegiatan pembangunan (Imtihan *et al.*, 2017). Perencanaan pembangunan secara

umum ialah suatu proses yang berkelanjutan dari masa ke masa berdasarkan sumber daya yang tersedia dan menyangkut pengorganisasian sistematis pembuat kebijakan (Setianingsih *et al.*, 2019).

Beberapa aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan monumen ini, antara lain pertama, pemerintah umumnya dianggap sebagai aktor administratif yang memikul tanggung jawab terbesar dalam pelaksanaan kebijakan baik di negara berkembang maupun negara maju. Aktor yang termasuk dalam unsur pemerintahan yang membantu perencanaan pembangunan monumen reyog ini seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Ponorogo; Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga; Kecamatan Sampung; dan Desa Sampung. Kedua, akademisi memainkan peran penting dalam konsep perencanaan pembangunan monumen berdasarkan data lapangan mengenai kemajuan pariwisata dan langkah-langkah yang efektif untuk mempromosikan sektor tersebut melalui penelitian, evaluasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Akademisi yang berperan dalam perencanaan pembangunan monumen ini salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Vani *et al.*, 2020). Ketiga, pihak swasta dalam perencanaan pembangunan monumen ini melibatkan PT. Widya Satria dari Surabaya sebagai pemenang tender pelaksana pembangunan. Dan yang terakhir ialah masyarakat, aktor lain yang terlibat ialah komunitas atau kelompok. Dalam pelaksanaannya banyak dilakukan oleh pejabat pemerintahan, oleh karena itu kelompok sosial berusaha mempengaruhi berbagai undang-undang pelaksana seperti arahan atau peraturan. Kegiatan kelompok-kelompok ini dirancang untuk mendapatkan keuntungan dari implementasi program-program tertentu (Yuningsih *et al.*, 2019).

Tahap selanjutnya menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan membandingkan masalah penelitian sebelumnya dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

Penelitian pertama, berjudul "*Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Smart Branding Pada Areal Pengelolaan Sampah Di Banksasuci Foundation*". Dalam pelaksanaan program bina lingkungan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri kreatif masyarakatnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, sebagai lembaga pengatur pemerintah provinsi, turut serta aktif. Penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan kolaboratif dalam menerapkan *smart branding* di Kota Tangerang oleh Banksasuci Foundation. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian

ini adalah *Collaborative Governance Regime* (CGR) Emerson, Nabatchi dan Balogh tahun (2012) (Syafitry, 2023).

Penelitian kedua, penelitian ini berjudul *The Recovery Of The Tourism Industry In Bali Province Through The Penta-Helix Collaboration Strategy In The New Normal Era*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pemulihan sektor pariwisata di Provinsi Bali dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang pada era *New Normal* dengan menerapkan strategi kolaborasi *PentaHelix* selama periode "*new normal*". Dalam penelitian ini menggunakan metode *PentaHelix*, ialah pendekatan yang melibatkan lima pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, penanam modal, dan media massa. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami beragam perspektif dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap tantangan pemulihan pariwisata di Bali (Budhi *et al.*, 2022).

Penelitian ketiga, dengan judul Strategi Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pariwisata. Pariwisata merupakan industri penting untuk meningkatkan perekonomian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi strategi yang diambil oleh pemerintah Desa Tanjung Alam dalam Upaya mengembangkan pariwisata di Telaga Biru. Pendekatan strategis yang diterapkan mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di Telaga Biru, perencanaan promosi yang lebih intensif, pembentukan tim pengelola permanen, kerjasama dengan sektor-sektor pendukung pariwisata, promosi destinasi wisata di pulau terutama di daerah pedalaman, dan pelatihan untuk pemandu wisata. Pemerintah Desa Tanjung Alam menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan pariwisata, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, dan keterlibatan yang kurang aktif dari pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam mendukung fasilitas penunjang pariwisata lainnya (Ristarnado *et al.*, 2019).

Penelitian keempat, berjudul Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model *PentaHelix* dalam upaya peningkatan sektor wisata di Kota Semarang. Kendala utama dalam pengembangan pariwisata di kota ini terletak pada kurang optimalnya kerjasama di antara para pihak yang terlibat. Landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian ini mencakup teori aktor kebijakan dan model *PentaHelix*. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan (Yuningsih *et al.*, 2019).

Penelitian kelima, berjudul Pengetahuan Wisatawan Mancanegara atas Kehadiran Patung Garuda Wisnu Kencana sebagai Ikon Pariwisata Indonesia. Pada tahun 2018,

Indonesia meluncurkan destinasi wisata baru yang signifikan, yakni patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Objek wisata ini menjadi sangat terkenal di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke Bali dan seluruh Indonesia, terpenting dari kalangan turis asing. Terinspirasi dari patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) bupati Ponorogo memutuskan kebijakan baru dengan mendirikan Monumen Reyog Ponorogo di Desa Sampung. Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, menyebarkan kuisisioner melalui media *online* untuk mengetahui seberapa familiar turis mancanegara dengan ikon patung tersebut. Sebaliknya dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan mendapatkan informasi yang objektif untuk mengetahui dan memahami proses kolaborasi antara aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo (MRP) di tambang batu kapur Desa Sampung wilayah administrasi Ponorogo (Supina, 2019).

Dilihat dari penelitian terdahulu diatas, penelitian ini lebih fokus pada analisis proses kolaborasi yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan monumen reyog Ponorogo menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut (Emerson & Nabatchi, 2015) dengan metode *quadruplehelix*. Dengan demikian, penelitian ini mempelajari secara menyeluruh bagaimana kerja sama maupun interaksi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan swasta, dan akademisi dapat memainkan peran penting dalam konsep perencanaan pembangunan monumen ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru bagi para pengambil kebijakan, perencana, dan akademisi tentang peran masing-masing aktor yang saling berhubungan dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan monumen, khususnya Monumen Reyog Ponorogo dengan penggalan aspek kolaboratif dalam pemerintahan. Kebaruan penelitian ini melibatkan peran inovatif dengan menjadi yang pertama dalam menganalisis proses kolaborasi dalam perencanaan pembangunan monumen reyog Ponorogo. Sebagai kebijakan baru dari bupati untuk menonjolkan ikon reyog Ponorogo yang berpotensi menciptakan identitas dan nilai-nilai budaya yang lebih mendalam untuk masyarakat.

*Collaborative governance* merupakan salah satu acuan dimana pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai target pemerintahan. Keterlibatan aktor non-pemerintah dalam pembangunan monumen reyog ini memberikan banyak masukan baik dari segi anggaran maupun inovasi pengelolaan yang ada terutama melalui kerjasama yang terstruktur. Dengan demikian, penting memikirkan bahwa keterlibatan beragam pihak ke dalam perencanaan pembangunan monumen membawa rasa tanggung

jawab bersama dan perubahan baru untuk mengelola manajemen yang tersedia. *Collaborative governance* sebagai proses terstruktur dimana banyak aktor berperan dan berinovatif dari beragam kawasan baik itu pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu sasaran, apabila dikerjakan oleh salah satu pihak saja tujuan tersebut tidak akan bisa tercapai (Molla *et al.*, 2021).

Perencanaan pembangunan monumen ini dilakukan dengan mempertimbangkan ragam, keistimewaan dan karakteristik budaya, alam, serta kebutuhan wisatawan untuk berwisata. Salah satu tujuan pembangunan pariwisata yang diusung oleh pemerintah adalah penerapan model *QuadrupleHelix* (Maturbongs, 2020). Program ini melibatkan berbagai aktor yang saling berbagi tugas dan pekerjaan sehingga terjadi kolaborasi dalam pembangunannya. Oleh karena itu pembangunan monumen ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai elemen seperti yang terdapat di dalam model *QuadrupleHelix* tersebut (Rozikin, 2019).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, persoalan yang dapat dirumuskan dalam penggalian data ini ialah “Bagaimana proses *collaborative governance* dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo di Desa Sampung berdasarkan perspektif *QuadrupleHelix* ?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mendeskripsikan model *Quadruplehelix* dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan proses *Collaborative Governance* dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo yang melibatkan kolaborasi antar berbagai aktor pemerintah maupun non-pemerintah.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan dapat membagikan manfaat yang bisa dirasakan oleh semua pihak, baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum dengan penjelasan yang mencakup aspek teoritis dan praktis.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pembangunan monumen reyog yang berada di Desa/Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dapat dijadikan landasan dan acuan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan wisata di suatu daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan untuk menambah informasi tentang peran pemerintah yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan wisata.

### b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai Desa Sampung. Serta pentingnya dukungan dan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan wisata.

### c. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penelitian dengan berpartisipasi langsung di masyarakat, serta dapat memberikan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan ke dunia nyata selama di bangku kuliah.

## E. PENEGLASAN ISTILAH

Dalam membahas masalah penelitian perlu ditekankan beberapa kata kunci agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran masalah yang diteliti. Untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

### 1. Monumen Reyog Ponorogo

Kesenian Reyog Ponorogo ialah salah satu nominasi warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage/ICH*) yang diusulkan Indonesia ke UNESCO. Pada tahun 2013, Mendikbud RI menetapkan Reyog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Reyog Ponorogo adalah seni pertunjukan rakyat tradisional dari Kabupaten Ponorogo yang menggabungkan penari Warok, Jatil, Bujangganong, Kelanasewandana, dan Barongan. Pada tanggal 13 Januari 1972, kesenian Reyog Ponorogo ditemukan dalam prasasti yang dibuat oleh Kerajaan Kanjuruhan pada tahun 760 Masehi. Instrumen pengiringnya terdiri dari kendang, kempul (gong), kethuk-kenong, slompret, tipung, dan angklung (Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, 2022).

Monumen merupakan patung yang didedikasikan sebagai pengingat terhadap suatu peristiwa bersejarah. Pembangunan monumen dilakukan dengan memperhatikan berbagai syarat dan prinsip agar sesuai dengan tujuan dan maksud pembuatannya. Sebuah monumen dibangun untuk menjaga ingatan akan keagungan bangunan. Secara umum bentuk monumen yang didirikan memakai pendekatan arsitektural yang lebih menitikberatkan pada keagungan bentuk baik berupa bangunan maupun atribut patung yang monumental. Monumen Reyog Ponorogo memiliki ketinggian mencapai 126 meter melampaui patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang terkenal di pulau Bali, serta patung reyog yang disusulkan menggunakan struktur baja.

Monumen sebagai penanda kota atau *landmark* memiliki hubungan erat yang didukung oleh beberapa kesamaan unsur dalam pembentukan karakter seni arsitektur. Selain sebagai *landmark* Ponorogo monumen ini tidak hanya sekedar struktur fisik saja, akan tetapi sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya bagi masyarakat Ponorogo. Monumen telah menjadi atraksi publik dan karya seni yang kehadirannya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang datang khususnya di Kabupaten Ponorogo. Pembangunan Monumen Reyog bertujuan untuk menonjolkan ikon reyog, mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata, serta merepresentasikan keunikan dan keindahan Reyog Ponorogo (Aji, 2015).

## 2. *QuadrupleHelix*

Menurut (Julfian, 2021) mengemukakan bahwa kolaborasi ialah proses bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Secara umum proses sosial yang paling mendasar adalah kolaborasi, proses ini melibatkan berbagai pihak yang berbagi peran untuk menyelesaikan tugas mereka dan mengambil tanggung jawab untuk mencapai tujuan ataupun targetnya. Masyarakat mewakili sumber daya yang baik untuk sistem kolaborasi, pada penelitian ini proses kolaborasi yang digunakan yaitu model *QuadrupleHelix*.

Model *QuadrupleHelix* adalah perluasan dari konsep *TripleHelix* yang melibatkan berbagai sektor masyarakat dan lembaga yang memiliki keuntungan untuk menerapkan inovasi. Kolaborasi sinergis ini diharapkan dapat mendukung inovasi melalui pemanfaatan sumber daya yang saling mendukung. *TripleHelix* pertama kali diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995, mencakup elemen akademik, swasta, dan pemerintahan. Untuk memasukkan

pandangan masyarakat, *QuadrupleHelix* diperkenalkan dengan menambahkan unsur *civil society* atau masyarakat. Konsep *QuadrupleHelix* tetap mempertahankan model interaksi *TripleHelix*, yang melibatkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi antara universitas, industri, dan negara, sambil melibatkan seluruh masyarakat sipil. Di Indonesia, model *QuadrupleHelix* diperluas dengan menambahkan unsur media, yang kemudian menjadi tambahan pada *PentaHelix*, mengingat peran khusus media (baik konvensional maupun sosial) dalam konteks perkembangan industri kreatif di Indonesia. Meskipun media merupakan elemen independen tanpa pengaruh langsung pada bagian atau fungsi lain, perannya diakui dalam kinerja dan perkembangan industri tersebut (Budhi *et al.*, 2022).

Penelitian ini menggunakan model *QuadrupleHelix*, menurut (Julfian, 2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *QuadrupleHelix* adalah solusi untuk industri kreatif untuk meningkatkan inovasi, kreativitas, dan teknologi. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang fokus pada peningkatan sumber daya manusia. Hal ini akan membuat mereka lebih inovatif, kreatif, dan proaktif agar kedepannya dapat berubah kearah yang lebih baik lagi. Untuk dapat mencapai tujuan ini, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk swasta, pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang tergabung dalam *QuadrupleHelix*. Model *QuadrupleHelix* adalah model inovasi yang berfokus pada kerja sama yang baik dan pembentukan *helix* yang saling tumpang tindih untuk mendorong pengembangan wilayah.

### **3. Garuda Wisnu Kencana**

Bali dipilih menjadi lokasi ikon pariwisata Indonesia yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Pada tanggal 22 September 2018, upacara peresmian patung Garuda Wisnu Kencana di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Ungasan, Bali dihadiri secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Patung ini merupakan karya I Nyoman Nuarta, seorang pematung terkenal asal Bali setelah melalui proses pembangunan selama 28 tahun akhirnya diresmikan. Garuda Wisnu Kencana yang terbuat dari tembaga, memegang status sebagai patung terbesar dalam jenisnya dan menduduki peringkat ketiga sebagai patung tertinggi di dunia. Patung ini telah menjadi ikon pariwisata yang sangat penting bagi Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Keistimewaan patung ini tidak hanya terletak pada ketinggiannya yang mencapai 121 meter dan lebar 65 meter tetapi juga pada nilai budaya dan sejarahnya yang kental. Dibandingkan dengan Patung *Liberty* di Amerika yang hanya memiliki

tinggi 93 meter, meskipun patung GWK memiliki ketinggian melebihi patung *Liberty* tetapi tetap memancarkan makna budaya dan sejarah yang mendalam (Supina, 2019).

## F. LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* menurut (Emerson & Nabatchi, 2015) karena dalam perencanaan pembangunan monumen reyog tidak hanya terpusat pada pemerintah, melainkan melibatkan berbagai aktor termasuk akademisi, swasta, dan masyarakat yang dianggap dapat mendukung pelaksanaan program ini. *Collaborative governance* menjadi suatu proses terstruktur yang melibatkan banyak aktor dan tidak terbatas pada batas organisasi bahkan lintas batas organisasi. Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama formal, aktif, terperinci, dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik (Wijayanti & Kasim, 2022).

Adanya *stakeholder* yang bekerja sama berarti bahwa proses ini bukanlah upaya yang dilakukan oleh satu aktor saja melainkan dapat diamati dari perspektif tata kelola kolaboratif di mana keempat unsur (pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat) bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Konsep tata kelola kolaboratif dapat diaplikasikan dalam menjelaskan proses perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo. Pakar lain (Emerson *et al.*, 2012) berpendapat bahwa kolaborasi harus memiliki penggerak yang memfasilitasi antar para pihak. Selain itu, *system context* yang dikendalikan oleh *drivers* diperlukan untuk memastikan bahwa proses kolaboratif beroperasi secara *collaboration dynamic*. Model kolaborasi (Emerson & Nabatchi, 2015) dikembangkan pada tahun 2015 perubahan yang diterapkan melibatkan penyempurnaan pada struktur awal berbentuk kotak yang serupa dengan ketegangan dan kedudukan yang menggantinya menjadi bentuk oval (*ellips*). Dengan merujuk pada gambar 1.1 terdiri beberapa tahapan yang menerapkan tata kelola kolaboratif menunjukkan serangkaian dimensi di mana berbagai komponen dan elemen ditempatkan untuk berinteraksi secara dinamis, tidak linear, dan berulang. Secara spesifik bentuk oval pada tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. *System Context*

Dinamika politik saat ini akan berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang tercermin dari program masing-masing pemerintahan yang berbeda. Selain itu, *system context* mencakup payung hukum, pengaruh politik, jaringan yang saling terhubung, kondisi sumber daya, lingkungan

dan budaya, belajar dari kegagalan di masa lalu, serta tingkat kepercayaan/konflik yang bertanggung jawab atas berlangsungnya perencanaan pembangunan monumen reyog serta menjadi faktor keberhasilannya (Emerson & Nabatchi, 2015).

## 2. *Drivers*

Selain perlu adanya landasan kolaborasi berupa sistem kontekstual yang harus dibangun untuk memulai dan memonitor kolaborasi, terdapat “*drivers*” atau faktor yang mengontrol keberhasilan kolaborasi (Emerson & Nabatchi, 2015) menurunkan empat (empat) dimensi *drivers*, yaitu:

- 1) Terdapat ketidakpastian yang harus diselesaikan bersama melalui sinergi dan pembagian resiko untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul dalam perencanaan pembangunan monumen tersebut.
- 2) Adanya insentif berupa imbalan berwujud dan tidak berwujud yang diterima para pihak untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan.
- 3) Saling ketergantungan antar para pihak yang disebabkan oleh kurangnya memahami teknologi, kompetisi sumber daya, data, dan lain-lain yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
- 4) Kepemimpinan sebagai pemain peran, konteks nasional, pemerintah (massa) diharapkan dapat menjadi pionir dan pelopor serta mampu mendorong berjalannya kerjasama, sedangkan di tingkat daerah, kepemimpinan dan komitmen pimpinan daerah lebih mendominasi berjalan atau tidaknya proses *Collaborative Governace* (Emerson & Nabatchi, 2015).

## 3. *Collaborative Dynamics*

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis *system context* dan *drivers* tersebut kolaborasi dapat bergerak secara dinamis. (Emerson *et al.*, 2012) memberikan inovasi pada proposisi dengan mengatakan bahwa proses kolaboratif terdiri dari tiga komponen tambahan, yaitu prinsip keterlibatan (*principle engangement*), motivasi bersama (*share motivation*), dan adanya kapasitas dari setiap pelaku/*stakeholders* (*capacity for joint action*). Adapun ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Principled Engagment* merupakan komponen penting karena melibatkan aktor dari berbagai latar belakang kepentingan. Mereka mengklaim bahwa perbedaan

latar belakang ini dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, membantu mencapai tujuan bersama, dan menghasilkan nilai-nilai yang dibangun. Dalam proses penggalan data mengenai aktor, sangat penting untuk memahami siapa yang berperan dan siapa yang mereka wakili.

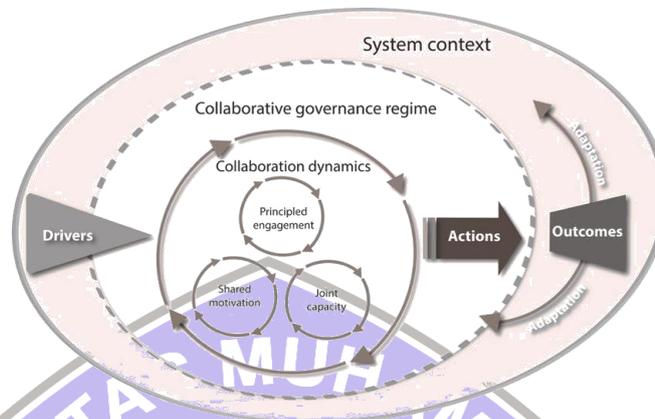
- 2) *Shared Motivation* dapat dilihat dari pemahaman yang saling menguntungkan kepercayaan, pemahaman, legitimasi internal, dan komitmen. Menurut (Emerson *et al.*, 2012), keempat unsur tersebut serupa dengan modal sosial yang membutuhkan waktu untuk berkembang dan memupuk kepercayaan antar masing-masing aktor. Kepercayaan jaringan sosial dapat membantu meringankan biaya transaksi, memajukan investasi dan menstabilkan hubungan, serta pertukaran pengetahuan dan informasi. Hubungan yang didasarkan pada kepercayaan akan meningkatkan pemahaman, saling menghargai, dan menghormati aktor satu dengan yang lain yang dapat mengurangi konflik.
- 3) *Capacity for Joint Actions* adalah komponen penting dari kolaborasi, karena CGR harus mampu mendorong aktor untuk terus berpartisipasi. (Emerson *et al.*, 2012) menciptakan bentuk partisipasi dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan kolaborasi. Kategori ini mencakup komponen penting seperti kepemimpinan, pengetahuan, sumber daya, serta pengaturan prosedural dan kelembagaan. (Emerson *et al.*, 2012) menekankan bahwa semua kegiatan kolaboratif tidak dapat mengabaikan pertemuan formal maupun informal, kelembagaan, dan aspek struktural lainnya. Untuk mempertahankan hubungan antar aktor, pertemuan formal sesuai dengan protokol dan desain kelembagaan diperlukan (Emerson *et al.*, 2012).

Pengetahuan yang dimiliki oleh para aktor baik yang dikumpulkan melalui proses kolaboratif maupun yang mereka peroleh sebelumnya, memengaruhi tingkat keterlibatan para aktor tersebut. Para aktor harus bertukar informasi, gagasan, dan perspektif dalam proses kolaboratif. Dalam hal ini, sumber daya yang dimiliki sangat penting karena kemampuan aktor untuk bergabung dipengaruhi oleh perbedaan pendanaan dan kepemilikan sumber daya. Oleh karena itu, pemetaan sumber daya yang mencakup pembiayaan program dan dukungan keuangan bagi aktor sangat memengaruhi tindakan mereka. (Emerson *et al.*, 2012) merumuskan CGR dengan sepuluh proposisi yang menjelaskan komponen kesuksesan, yaitu :

- 1) Proposisi pertama, adanya satu atau lebih penggerak kepemimpinan yang diakui peserta dapat meningkatkan keberhasilan CGR.
- 2) Proposisi kedua, keterlibatan berprinsip dalam CGR melalui proses interaktif dimulai dari penemuan masalah, mengartikan bersama, meninjau pilihan kebijakan, hingga penentuan kebijakan. Dengan demikian, kualitas interaksi antara aktor menentukan efektivitas.
- 3) Proposisi ketiga, kegiatan kolaboratif yang didasarkan pada keterlibatan berprinsip membutuhkan pembangunan kepercayaan, pemahaman, dan komitmen yang dapat menghasilkan dan mempertahankan komitmen bersama.
- 4) Proposisi keempat, motivasi bersama dihasilkan dari tahapan keterlibatan berprinsip yang menghasilkan siklus positif agar dapat membantu mempertahankan para aktor.
- 5) Proposisi kelima, keterlibatan berprinsip dan motivasi bersama akan mendorong pengembangan tatanan kepemimpinan, sumber daya, kelembagaan, dan pengetahuan untuk menciptakan serta mempertahankan kapasitas untuk aksi bersama.
- 6) Proposisi keenam, tujuan CGR, teori aksi bersama, dan hasil yang ditargetkan menentukan kapasitas untuk tindakan bersama
- 7) Proposisi ketujuh, keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kemampuan untuk tindakan bersama sangat penting dalam menentukan kualitas dan jangkauan dinamika kolaboratif.
- 8) Proposisi kedelapan, teori tindakan kolaboratif harus didefinisikan dengan jelas oleh mitra kolaboratif, dan fungsi dinamika kolaboratif harus menghasilkan kemampuan yang diperlukan untuk tindakan kolaboratif.
- 9) Proposisi kesembilan, sebagai hasil dari penerapan teori aksi bersama dalam dinamika kolaboratif, menunjukkan bahwa hasil tindakan kolaboratif lebih dekat dengan hasil yang diinginkan dan lebih sedikit efek negatifnya.
- 10) Proposisi kesepuluh, keberhasilan CGR dapat diukur dengan melihat aspek berkelanjutan, mencakup adaptasi alami yang berkembang seiring waktu serta tingkat dampak yang dihasilkan oleh tindakan bersama (Emerson *et al.*, 2012).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* menurut (Emerson & Nabatchi, 2015) terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tahapan-tahapan *collaborative governance* menurut Emerson dan Nabatchi, 2015



Sumber : (Emerson & Nabatchi, 2015)

Dalam perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo dilakukan kolaborasi model *QuadrupleHelix* yang melibatkan beberapa pihak dan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan ini. Berikut peran masing-masing unsur dari *QuadrupleHelix* yaitu :

- a. Pemerintah, berperan sebagai regulator dan pengawas dalam pengembangan objek, peran ini mencakup berbagai kegiatan seperti perancangan, penerapan, pemantauan, pengelolaan, promosi, pembiayaan, persetujuan, pemograman, pembentukan undang-undang, perluasan wawasan, inovasi kebijakan publik, dukungan untuk jaringan inovasi, dan kemitraan antara sektor publik dan swasta. Selain itu, melakukan fungsi koordinasi dalam pengembangan kerjasama.
- b. Perusahaan (swasta), berfungsi sebagai unsur yang menerapkan proses bisnis untuk menciptakan nilai dan mempertahankan kemajuan yang berkesinambungan. Sebagai infrastruktur bisnis, perusahaan berkolaborasi untuk mendukung perubahan dalam sumber daya manusia perusahaan.
- c. Akademisi, memiliki peran vital sebagai pengorganisir mengemban tanggung jawab seperti mengukur proses, memberikan sertifikasi, dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam rangka mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan. Mereka sebagai pemegang pengetahuan menggunakan

konsep dan teori terbaru terkait dengan perkembangan kegiatan atau sektor dengan tujuan mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

- d. Masyarakat/komunitas, bertindak sebagai pendorong percepatan dan kemajuan. Dalam konteks ini, anggota komunitas memiliki minat yang sejalan dan terkait dengan pertumbuhan bisnis. Komunitas juga memiliki peran sebagai perantara atau mitra antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Keanggotaan dalam komunitas dapat melibatkan unsur resmi atau individu yang memiliki kontribusi signifikan dalam upaya perencanaan pembangunan monumen reyog (Budhi *et al.*, 2022).

## G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan bagian yang memaparkan tentang dimensi yang terdapat di teori. Berdasarkan rumusan dimensi dan bagian yang dikembangkan oleh (Emerson & Nabatchi, 2015) berupa kerangka kerja analisis manajemen kolaboratif yang digunakan sebagai alat analisis penelitian. (Emerson & Nabatchi, 2015) menjelaskan mengenai *System Context*, dinamika politik saat ini akan berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang tercermin dari program masing-masing pemerintahan yang berbeda. Selain itu, dalam dimensi kerangka hukum kebijakan, kejelasan kelembagaan dan batas atas hukum kegiatan para pihak yang bertanggung jawab atas berlangsungnya pembangunan monumen reyog juga menjadi faktor keberhasilannya; *Drivers*, selain perlu adanya landasan kolaborasi berupa sistem kontekstual yang harus dibangun untuk memulai dan memonitor kolaborasi, terdapat “*drivers*” atau faktor yang mengontrol keberhasilan kolaborasi. Dan yang terakhir ialah *Collaborative Dynamics* berdasarkan identifikasi dan analisis konteks sistem dan penggerak di atas, maka dinamika kolaborasi dapat terus bergerak secara dinamis dari identifikasi peran awal melalui komitmen yang berprinsip atau keterlibatan aktor dalam pemenuhan peran mereka sendiri, diawali dari mengidentifikasi informasi awal, penjelasan setiap tindakan, pertimbangan/diskusi termasuk kesepakatan tentang tujuan/pencapaian tindakan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Partisipasi aktor sosial dan masyarakat sipil harus ditingkatkan dan dikembangkan secara komprehensif (Wijayanti & Kasim, 2022).

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Kajian ini menerapkan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena dalam konteks sosial alamiah. Fokus utama metode ini menekankan pada interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang sedang diselidiki (Kusnandar, 2001). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menggali dan memahami secara sistematis makna dari suatu fenomena atau peristiwa sosial dan pengalaman beberapa kelompok atau individu melalui interaksi, dokumentasi, dan analisis data, yang terjadi secara induktif untuk memperoleh informasi yang bermakna berupa kata-kata atau deskriptif.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan maksud untuk menemukan informasi berkualitas tinggi dengan lebih menonjolkan dan menggambarkan persoalan pada suatu manfaat dan prosesnya. Metode ini bersifat deskriptif dimaksudkan untuk mencerminkan realitas peristiwa yang diteliti sehingga mempermudah penulis mendapatkan informasi yang obyektif untuk mengetahui dan memahami manajemen perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo (MRP) di pertambangan batu gamping Desa Sampung Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap keadaan sebenarnya di lapangan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi (Ristarnado & Settyo, 2019).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana seorang peneliti melakukan studi, terutama untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sesungguhnya terjadi di area penelitian dengan tujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Berdasarkan penjelasan lokasi tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Bappeda, Kantor Disbudparpora, Kantor Kecamatan Sampung, Kantor Desa Sampung, lokasi pembangunan monumen reyog, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena terdapat informan yang sesuai dan banyak dari mereka terlibat dalam praktik kolaborasi di wilayah tersebut.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Informan penelitian memiliki data serta pengetahuan yang luas dan mendalam tentang pertanyaan penelitian untuk mendapatkan informasi yang berguna. Informan juga bertindak sebagai referensi untuk bahan yang diteliti. Subjek yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari Bappeda Litbang, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Tim Ahli Bupati, Kecamatan Sampung, dan Desa Sampung; masyarakat Desa Sampung; dan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive*. *Purposive* didefinisikan sebagai proses pengambilan informan yang dilakukan dengan sengaja atau telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informan yang berkualitas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan fokus utama dalam suatu penelitian. Seorang peneliti perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ini, peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, seperti :

##### 1) Wawancara

Wawancara digunakan untuk melengkapi dan upaya untuk mendapatkan informasi yang akurat dari sumber data yang tepat. Kajian ini melakukan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti bebas mengajukan dan mengembangkan pertanyaan, selama pertanyaan tersebut sudah dijawab dengan benar. Dengan metode wawancara ini memberikan waktu peneliti untuk mendalami informasi disetiap pertanyaan terkait dengan proses perencanaan pembangunan monumen reyog Ponorogo. Peneliti menggunakan alat bantu *tape recorder* untuk merekam setiap jawaban dari informan. Berikut beberapa informan yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo dan hasil wawancara digunakan untuk penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Erwin Feisal Fahmi, S.T., selaku staff pelaksana analisis tata ruang di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo yang memiliki informasi terkait perencanaan pembangunan monumen reyog.
- b. Y. Daniel Tri Baskoro, S.E., kepala bidang kebudayaan Disbudparpora yang turut melaksanakan dan mendukung *collaborative governance quadruplehelix* dalam perencanaan program ini.
- c. Junjung Adi Santoso, S.IP., M.Si, kasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Sampung dengan melibatkan informan ini dapat memberikan informasi praktis tentang logistik, infrastruktur, dan aspek teknis lainnya yang sesuai untuk lokasi pembangunan Monumen Reyog.

- d. Sujoso, S.Sos., sebagai kepala Desa Sampung memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Sampung. Kedekatannya dengan masyarakat setempat memungkinkan akses yang lebih mudah untuk informasi yang sesuai.
- e. Wisnu Hadi Prayitno, selaku Tim Ahli Bupati Sugiri Sancoko dan budayawan Kabupaten Ponorogo
- f. Dr. Ridho Kurnianto, M.Ag, Akademisi UMPO sekaligus Ketua Yayasan Reyog dan dewan juri dalam sayembara gagasan desain monumen reyog dan memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokal terkait dengan seni reyog.
- g. Dr. Slamet Santoso, M.Si, selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang terlibat dalam perencanaan pembangunan monumen reyog dalam memahami aspek teknis dan keberlanjutan yang diperlukan untuk merancang sebuah monumen yang berkualitas.
- h. Budiono, masyarakat Desa Sampung salah satu informan yang memiliki pemahaman tentang lingkungan dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana informasi berasal dari catatan penting yang bisa diperoleh baik dari lembaga, organisasi, ataupun individu. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan gambar oleh peneliti untuk mengkonfirmasi hasil penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam beberapa langkah, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3<sup>rd</sup> ed.)* analisis data dilakukan dalam tiga langkah yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta membuat dan memverifikasi kesimpulan (*onclusion drawing and verification*).

### 1) Kondensasi Data ( *Data Condensation* )

Kondensasi data merujuk pada langkah-langkah seperti pemilihan, pemfokusan, peringkasan, penyederhanaan, serta mengubah catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumentasi, dan data empiris. Peneliti secara selektif memilih data, mengidentifikasi tema dan pola yang signifikan, serta menghilangkan elemen yang tidak relevan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi langsung tentang proses

kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan pembangunan monumen reyog Ponorogo. Penelitian ini juga menyelidiki siapa saja *stakeholders* yang berpartisipasi dalam program pembangunan tersebut dan bagaimana prosesnya dilakukan. Dalam tahap ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemilihan ( *Selecting* ), peneliti perlu berhati-hati dalam memilih fokus penelitian dan hubungan yang lebih penting, sehingga dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi yang lebih bermakna sebagai hasilnya.
  - b. Pemfokusan ( *Focusing* ), pemberian fokus pada data merupakan langkah awal dalam analisis pra-penelitian. Pada tahap ini, fokus peneliti tertuju pada data yang terkait dengan perumusan masalah penelitian. Hal ini merupakan kelanjutan dari proses seleksi data di mana peneliti mempersempit lingkup data sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan.
  - c. Penyederhanaan ( *Abstracting* ), langkah ini meringkas inti, proses, dan pertanyaan agar tetap berada di intinya. Fase ini, data yang dikumpulkan secara khusus dinilai keunggulan dan kelayakannya.
  - d. Penyederhanaan dan Transformasi ( *Data Simplifying dan Transforming* ), data dalam penelitian ini dilakukan penyederhanaan dan transformasi dengan beberapa metode seperti seleksi ketat melalui rangkuman singkat dan pengambilan data untuk membentuk pola yang lebih umum.
- 2) Penyajian Data ( *Data Display* )

Langkah selanjutnya ialah penyajian data dapat dijelaskan sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan untuk menyimpulkan dan menentukan tindakan yang perlu diambil. Dengan menyajikan data ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang situasi saat ini dan kebutuhan tindakan yang perlu dilakukan. Artinya, jika peneliti melanjutkan analisis atau berupaya mengambil tindakan lebih lanjut berdasarkan hasilnya. Data yang ditunjukkan telah melalui proses reduksi data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang disajikan digunakan untuk membantu penulis memahami masalah penelitian dan melanjutkan ke langkah selanjutnya. Secara umum, presentasi adalah suatu susunan dan sekumpulan informasi yang telah dipersempit sehingga dapat dicapai kesimpulan. Data ini dapat disajikan melalui berbagai cara seperti grafik, bagan, deskripsi, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan informasi tentang proses *collaborative governance* dalam

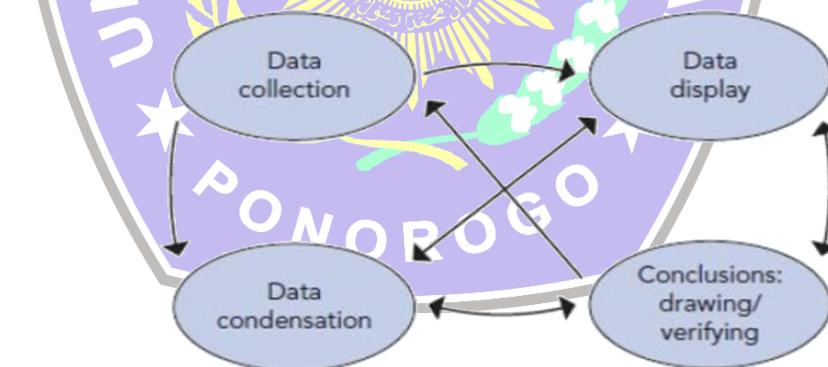
perencanaan pembangunan monumen reyog Ponorogo dan semua pihak yang terlibat dalam program tersebut, langkah selanjutnya adalah menyusun hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dibuat dan dipresentasikan serta dibahas secara mendalam.

3) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi ( *Drawing and Verifying Conclusions* )

Dari berbagai tahapan yang telah diselesaikan melibatkan pengumpulan data, dengan data terakhir mencakup penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Selanjutnya, hasil tersebut dibandingkan kembali dengan bukti-bukti yang telah terkumpul di lapangan. Kesimpulan ialah bukti dari penelitian yang dilakukan dengan memaparkan hasil penelitian menggunakan pola, deskripsi, atau penjelasan. Peneliti akan membuat kesimpulan mengenai proses perencanaan pembangunan Monumen Reyog Ponorogo di Desa Sampung dengan merujuk pada bukti, data, dan wawasan yang tepat berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan (Miles *et al.*, 2014).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data melibatkan serangkaian tahapan tertentu yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Model Teknik Analisis Data menurut Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2014



Sumber : (Miles *et al.*, 2014)

## 6. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk menunjukkan kesuksesan dan keyakinan terhadap hasil penelitian, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan unsur-unsur selain data tersebut. Teknik ini bertujuan untuk pemeriksaan ulang atau perbandingan terhadap data. Dalam konteks pengujian,

triangulasi memaknai kredibilitas sebagai pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang berbeda melalui metode, pendekatan, dan periode waktu yang beragam.

Menurut (Denzin, 1978) terdapat empat metode triangulasi digunakan dalam penelitian mencakup triangulasi data, triangulasi antar peneliti/investigator, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Fokus penelitian ini terletak pada triangulasi metode, di mana peneliti membandingkan informasi atau data menggunakan pendekatan yang berbeda. Peneliti juga dapat membandingkan cara pandang seseorang terhadap topik yang sama dengan orang lain. Peneliti menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Metode ini dianggap dapat menyediakan informasi yang akurat dan pasti (Denzin, 1978).

